

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT KETERANGAN PENGGANTI LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	13
BAB II	15
A. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Tbk.	15

1. Definisi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia	15
2. Pandangan Internasional terkait Badan Usaha Milik Negara.....	17
B. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang BUMN, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Keputusan Menteri BUMN.....	21
1. Prinsip Pengelolaan BUMN Berdasarkan Undang-Undang BUMN.....	21
2. Prinsip Pengelolaan BUMN Berdasarkan UU PT.....	27
3. Prinsip Pengelolaan BUMN Berdasarkan UU Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.....	36
5. Prinsip Pengelolaan BUMN Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN .	39
C. Penugasan Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara	42
1. Peran Pemerintah dalam Memberikan Penugasan Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara.....	44
2. Peran Direksi Badan Usaha Milik Negara dalam Menerima Penugasan Pemerintah	45
D. Keuangan Badan Usaha Milik Negara sebagai Bagian dari Keuangan Negara.....	46
E. Kerugian Badan Usaha Milik Negara	47
1. Pengertian Kerugian Menurut Hukum Perdata	48

2. Pengertian Kerugian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	49
F. Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> dalam Perseroan Terbatas Badan Usaha Milik Negara	50
1. Latar Belakang Lahirnya Prinsip <i>Business Judgment Rule</i>	50
2. Tujuan Prinsip <i>Business Judgment Rule</i>	51
3. <i>Business Judgment Rule</i> dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas	52
4. Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> dalam Pengelolaan BUMN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022.....	64
BAB III	66
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	66
B. Bahan Penelitian.....	66
D. Cara Pengumpulan Data	69
D. Analisis Hasil Penelitian	70
BAB IV	72
A. Dampak Timbulnya Potensi Kerugian PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dari Pelaksanaan Penetapan Harga Gas USD 6/MMBTU melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020	72

1. Latar Belakang Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 89 Tahun 2020 dan Nomor 91 Tahun 2020	72
2. Penugasan Penyaluran Gas Bumi Kepada Pengguna Gas Bumi di Bidang Industri melalui PT Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaannya	82
B. Penerapan Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> dalam Pertanggungjawaban Direksi.....	104
a. Kerugian tersebut bukan merupakan kesalahan atau kelalaiannya...	105
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan	106
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian	107
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut	107
BAB V	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR GAMBAR

No.	Kode Gambar	Substansi Gambar
1	Gambar 1	Skema Bisnis PT Perusahaan Gas Negara
2	Gambar 2	Perkiraan Kerugian PT Perusahaan Gas Negara dalam periode penerimaan penugasan pemerintah 2020-2024